

ANALISIS KOMUNIKASI KRISIS PEMERINTAH PUSAT REPUBLIK INDONESIA (RI) DALAM MENGATASI KRISIS MINYAK GORENG

R. Firdaus Wahyudi¹, Suriati²

¹Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin, No. 20 Balangnipa, Sinjai

²Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, Jl. Sultan Hasanuddin, No. 20 Balangnipa, Sinjai

¹E-mail : cheyudi@yahoo.co.id

²E-mail : suriatimarjan@gmail.com

Abstract

This research aimed to explain about the strategies of crisis communication used by central Government of RI in resolving cooking oil either related to scarcity or price increase of cooking oil. This research is study of library research based on selected online news and President of RI, Joko Widodo posts on his social media, Twitter. In this study revealed that there were various strategy of crisis communication implemented by central government of RI in resolve the crisis of cooking oil such as; by doing inspection to field directly to ensured the price or stock of cooking oil; giving instruction to the trade minister to issued regulations due to governance of cooking oil; policy to subsidy and cash transfers for cooking oil; and also cabinet reshuffle policy for the trade minister position in order to enhanced the central government efforts to resolve such cooking oil crisis.

Keyword: crisis communication, strategy and cooking oil.

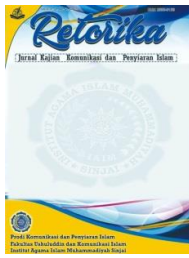
Abstrak

Penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi komunikasi krisis yang dilakukan oleh Pemerintah pusat dalam mengatasi krisis minyak goreng baik terkait dengan kelangkaannya maupun kenaikan harga minyak goreng tersebut. Penelitian ini merupakan kajian pustaka berdasarkan berita terpilih di portal berita Online dan juga berdasarkan *postingan* Presiden Joko Widodo di Twitter. Dalam penelitian ini terungkap bahwa berbagai upaya strategi komunikasi krisis yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis minyak goreng seperti melakukan inspeksi kelapangan untuk melihat secara langsung stok dan harga minyak goreng; menginstruksikan menteri perdagangan untuk mengeluarkan aturan atau kebijakan terkait tata kelola minyak goreng; melakukan kebijakan subsidi dan bantuan langsung tunai minyak goreng, serta melakukan pergantian posisi menteri perdagangan sebagai langkah untuk memaksimalkan upaya pemerintah pusat dalam mengatasi krisis minyak goreng tersebut.

Kata Kunci. *Komunikasi krisis, strategi dan minyak goreng*

1. Pendahuluan

Salah satu persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dalam gejala ketidakpastian ekonomi global adalah kenaikan harga minyak goreng. Tingginya harga minyak yang jauh dari harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah yakni Rp 14.000 berdampak pada peningkatan inflasi di Indonesia. Kelangkaan Minyak goreng sebenarnya sudah terlihat pada akhir tahun 2021, di mana sebagaimana dikemukakan



RETORIKA

Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam

Volume 4, No. 2, 2022

P-ISSN : 2655-5166 / E-ISSN : 2715-2103

Email : jurnalretorika46@gmail.com

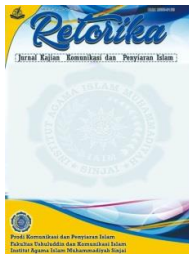
Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/index.php/retorika>

DOI : <https://doi.org/10.47435/retorika.v3i1.577>

oleh data Pusat Informasi Harga pangan strategis Nasional dalam katadata.id, harga minyak goreng pada tanggal 7 Oktober 2021 telah mencapai Rp. 15.550,- per kilogram. Pada awal Januari harga minyak goreng mengalami lonjakan yang signifikan, di mana harganya per kilogram mencapai Rp. 18.550. Bahkan harga rekor minyak goreng curah sempat menyentuh Rp 20.000 per liter ([/www.cnbcindonesia.com/news](http://www.cnbcindonesia.com/news)). Fluktuasi harga minyak goreng yang cenderung tinggi tentunya berdampak pada berbagai sektor perekonomian terutama bagi masyarakat luas, karena minyak goreng merupakan bagian dari produk bahan pokok masyarakat.

Minyak goreng bagi masyarakat Indonesia adalah salah satu kebutuhan pokok atau merupakan salah satu dari Sembako (sembilan bahan pokok) menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Dalam kehidupan sehari-hari minyak goreng dikonsumsi oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia baik yang berada di perkotaan maupun perdesaan (Amang, 1996: 37). Minyak goreng digunakan untuk memasak seperti: penumisan, penggorengan dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Sebab minyak goreng dapat memberikan aroma yang sedap, cita rasa yang lebih lezat, gurih, membuat makanan menjadi renyah atau crispy, serta penampilan yang lebih menarik memberikan warna keemasan dan kecokelatan daripada makanan yang dikukus, direbus atau dipanggang.

Peran minyak goreng sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia mesti menjadi perhatian utama pula bagi pemerintah, tak terkecuali bahwa minyak goreng juga menggerakkan ekonomi berbagai elemen masyarakat, misalnya makanan yang proses pemasakan dengan cara di goreng hampir dijual setiap elemen kelas di masyarakat mulai restoran hingga penjual gorengan yang dijajakan dipinggir jalan. Secara umum kenaikan minyak goreng merupakan efek dari beberapa aspek yakni; kenaikan harga minyak nabati dunia. program biodiesel adalah program pemerintah yang mewajibkan pencampuran CPO dalam bentuk Fatty Acid Methyl Ester (FAME), dengan bahan bakar minyak (BBM) jenis Solar, adanya pandemi Covid-19. Situasi pandemi memang memberikan banyak dampak, tak hanya pada bidang kesehatan saja, namun juga bisa berdampak pada kondisi ekonomi termasuk kenaikan bahan pokok (<https://katadata.co.id/agung/berita/6233ff14d5695/kenapa-minyak-goreng-mahal-ini-tiga-alasannya>). Kebutuhan akan nabati di dunia yang meningkat, tentunya mengakibatkan meningkatnya permintaan akan minyak, demikian halnya dengan adanya pengembangan bahan bakar yang menggunakan CPO (minyak sawit) akan berdampak naiknya permintaan akan minyak sawit pula. Namun tingginya permintaan tidak diimbangi dengan tingginya penawaran, di mana hal ini dikarenakan



RETORIKA

Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam

Volume 4, No. 2, 2022

P-ISSN : 2655-5166 / E-ISSN : 2715-2103

Email : jurnalretorika46@gmail.com

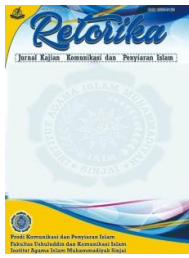
Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/indeks.php/retorika>

DOI : <https://doi.org/10.47435/retorika.v3i1.577>

adanya pandemi Covid-19 yang menjangkit seluruh dunia mengakibatkan terganggunya produksi minyak (<https://katadata.co.id>) Tingginya permintaan dan rendahnya penawaran terhadap minyak sawit berakibat naiknya harga minyak sawit/CPO/minyak goreng. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa kenaikan minyak goreng yang merupakan primadona masyarakat Indonesia dalam membuat masakan, maka akan berdampak kenaikan harga bahan pokok lainnya.

Kenaikan minyak goreng berimbas semakin lemahnya daya beli masyarakat, memberi beban bagi para restoran hingga penjual gorengan kaki lima. Kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng mesti direspons secara cepat oleh pemerintah, karena krisis minyak goreng ini merupakan hal yang fundamental dan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan mesti diperlihatkan dan dikomunikasikan kemasyarakatan agar masyarakat tidak jadi panik dengan situasi dan kurang responsnya masyarakat. upaya pemerintah mesti bersifat koordinatif atau kerja sama berbagai institusi pemerintahan terkait terutamanya bagaimana Presiden Indonesia, Joko Widodo dan menternya dalam menentukan arah kebijakan terkait penanganan krisis minyak goreng. Serta juga bagaimana kemampuan Pemerintah dalam mengkomunikasikan ke berbagai elemen masyarakat terkait langkah-langkah yang diambil terkait penanganan krisis minyak goreng ini, sehingga masyarakat merespons secara baik dan tepat terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Strategi ini merupakan bentuk strategi manajemen komunikasi krisis atau upaya komunikatif pemerintah dalam melakukan upaya-upaya terkait penanganan krisis kelangkaan dan harga dari minyak goreng yang terjadi dimasyarakat. Bentuk lain dalam penyampaian suatu kebijakan terhadap elemen masyarakat hingga publik umum, bisa disebut dengan komunikasi pemerintahan. Komunikasi pemerintah berarti penyampaian ide, gagasan, informasi, isi pikiran/ Pernyataan dari pemerintah kepada masyarakat dalam rangkai mencapai tujuan negara (Sedarmayanti, 2018). Di samping itu salah satu bentuk putusan pemerintah pusat yang memiliki kekuatan hukum yaitu peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan menteri.

Jika krisis komunikasi mengarah terjadinya persoalan atau problem dalam suatu tindak komunikasi baik dari komunikator, pesan atau media yang menyebabkan kesalahpahaman, maka komunikasi krisis mengarah bagaimana pemaksimalan berbagai elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi dalam upaya menangani krisis yang ada. Berbagai elemen itu seperti komunikator atau orang dan pihak yang memiliki perhatian, kemampuan, wewenang atau tanggung jawab terhadap krisis yang terjadi. Pada pihak komunikan diarahkan pada aktor, orang, institusi hingga semua elemen



masyarakat yang berkontribusi atau yang terimbas dari suatu krisis. Sedangkan saluran merupakan berbagai media komunikasi yang digunakan untuk melakukan komunikasi baik bersifat koordinatif, persuasif, simbolik hingga komunikasi yang bersifat memiliki kekuatan hukum (seperti penyampaian hasil kebijakan pemerintah)

Penelitian ini mencoba melakukan analisa terkait dengan upaya-upaya pemerintah RI dalam hal ini Joko Widodo selaku presiden (eksekutif) dalam melakukan upaya-upaya atau langkah langkah terkait dengan krisis kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng tersebut atau manajemen komunikasi krisis mengenai minyak goreng. Sebagai Presiden dan kepala pemerintahan eksekutif, Presiden Jokowi memiliki wewenang dalam melakukan kebijakan-kebijakan terkait dalam bidang ekonomi seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Dengan di bantu menterinya, presiden berkewajiban untuk mengelola perekonomian sesuai dengan UUD 45, serta juga mampu mencegah, mengatasi persoalan perekonomian termasuk kelangkaan dan tingginya harga dari minyak goreng. Setiap langkah-langkah, terutama terkait kebijakan yang diambil mesti dikomunikasi ke publik sebagai upaya bentuk tanggung jawabnya dalam menciptakan *good governance* (transparansi kebijakan), bisa juga membangun opini publik tentang keseriusan pemerintah dalam menangani krisis ini yang berefek pada dukungan masyarakat dalam membantu mengatasi krisis ini.

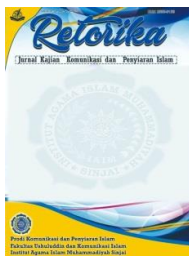
2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan "*library reserach*" dengan mengkaji berbagai sumber berita terutama berita berbasis Online (portal berita digital)terkait dengan upaya-upaya pemerintah mengenai krisis minyak goreng yang terjadi di akhir tahun 2021 hingga per bulan Juni 2022, serta juga menggunakan media sosial sebagai sumber utama, terutama Twitter resmi dari akun Joko Widodo sebagai acuan untuk mengidentifikasi langkah-langkah pemerintah Pusat (pemerintahan Joko Widodo) dalam menangani krisis minyak goreng baik berupa produk hukum maupun pernyataan yang dikemukakan oleh Pemerintah pusat (Presiden Joko Widodo) dan jajaran melalui media sosial tersebut atau yang dikutip dalam pemberitaan di media massa.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Awal krisis minyak goreng

Krisis minyak goreng di Indonesia bermuara pada dua hal yang pertama adalah kelangkaan minyak goreng dan tingginya harga minyak goreng baik minyak goreng curah maupun minyak goreng kemasan. Dua bentuk masalah tersebut tidak bersifat terpisah, namun sebagai masalah kontinuitas di mana krisis minyak goreng dimulai



dengan krisis kelangkaan minyak goreng di pasaran lalu kemudian diikuti dengan kenaikan harga minyak goreng. Sebagai di kemukakan sebelumnya bahwa tingginya permintaan dunia dengan minyak sawit akibat pemulihan ekonomi di berbagai negara setelah pandemi Covid 19 memicu kenaikan harga kelapa sawit didunia. Meski Indonesia merupakan produsen Kelapa Sawit (minyak goreng) terbesar didunia, namun karena proses penentuan harga minyak menggunakan mekanisme pasar mengakibatkan harga minyak goreng di Indonesia juga naik rekam kenaikan minyak goreng didokumentasi pada berita online www.idxchannel.com, dikemukakan bahwa kenaikan harga minyak goreng naik hingga Rp. 20.000 ribu/liter dari Rp 12.000/liter. Bahkan harga per Januari mengalami kenaikan hingga sebagaimana dikemukakan oleh portal berita liputan 6.com bahwa *Sementara di pasar tradisional, minyak goreng kemasan bermerek 2 dibanderol Rp 20.550 per kg (naik 1,23 persen). Harga minyak goreng curah di pasar modern ditawarkan seharga Rp 19.450 per kg (naik 1,04 persen), dan Rp Rp 18.800 per kg (naik 0,53 persen) di pasar tradisional. Sedangkan harga minyak goreng kemasan bermerek 1 di pasar tradisional terpantau seharga Rp 21.150 per kg (naik 1,2 persen), dan Rp 21.050 (harga tetap) di pasar modern.*

Adapun kelangkaan yang terjadi dikarenakan, selain mulai meningkatnya permintaan dunia akan minyak goreng, berbanding terbalik dengan produksi minyak kelapa sawit oleh produsen minyak sawit termasuk Indonesia yang sempat terpukul karena Pandemi covid-19 (pemberlakuan Lock Down). Di samping itu, kelangkaan minyak goreng di Indonesia, karena banyak pengusaha minyak goreng lebih memilih menunggu kepastian harga, lebih memprioritaskan ekspor karena lebih menguntungkan serta ada upaya oknum-oknum yang melakukan penimbunan untuk mempengaruhi harga pasar, sebagaimana dikemukakan dalam portal berita Kompas.com tanggal 16/03/2022 bahwa *selain banyaknya produk yang dijual keluar negeri. Kelangkaan dipengaruhi dengan banyaknya pedagang yang bermain dan mencari keuntungan dibalik kelangkaan ini.*

b. Langkah Manajemen dan komunikasi krisis Pemerintah

1) Penerbitan kebijakan atau peraturan

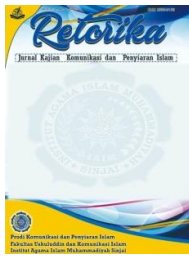
Dalam manajemen krisis upaya dilakukan selain merespons memetakan krisis tersebut juga dilakukan upaya melakukan tindakan (kebijakan, peraturan dsb) serta melakukan sosialisasi komunikasi krisis ke masyarakat sebagai wujud komitmen dan keseriusan dalam mengatasi krisis yang terjadi

Terkait dengan naiknya harga minyak goreng serta kelangkaan yang mengakibatkan krisis dimasyarakat, maka upaya pemerintah terutama pada awal awal krisis minyak goreng adalah melakukan upaya dan komitmen untuk melakukan perbaikan dan pengadaan stok minyak goreng di pasaran. Hal ini terlihat dari unggahan di Twitternya Joko Widodo selaku presiden RI sebagai berikut



Gambar 1. Pernyataan Presiden Terkait Dengan Kelangkaan Minyak Goreng

Postingan dan pernyataan Joko Widodo di atas merupakan bentuk komunikasi krisis yang responsif, dan bersifat koordinatif, instruktif atau persuasif. Pernyataan tersebut merupakan komunikasi persuasif terutama bagi menteri dan pemerintahan daerah untuk melakukan berbagai upaya seperti operasi pasar dalam menangani krisis kelangkaan minyak goreng tersebut. Upaya bentuk kebijakan yang wujudkan terkait penjabaran instruksi presiden maka, menteri perdagangan M. Lutfi mengeluarkan kebijakan menteri berupa **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2022 tentang penetapan harga tertinggi minyak goreng sawit** yang berlaku per 1 Februari 2022, di mana rinciannya adalah harga eceran tertinggi / HET minyak goreng mulai 1 Februari 2022: -Harga minyak goreng curah sebesar Rp 11.500/liter, -Harga minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 13.500/liter, -Harga minyak goreng kemasan premium sebesar Rp 14.000/liter (<https://www.idxchannel.com>). Adapun bentuk langkah komunikasi krisis dalam menanggulangi harga dan kelangkaan Minyak goreng, Pemerintah Pusat menginstruksikan untuk melakukan intervensi pasar yakni dengan melakukan operasi pasar. Selain pengeluaran beberapa aturan pemerintah pusat melalui menteri perdagangan melakukan upaya operasi pasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat



RETORIKA

Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam

Volume 4, No. 2, 2022

P-ISSN : 2655-5166 / E-ISSN : 2715-2103

Email : jurnalretorika46@gmail.com

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/indeks.php/retorika>

DOI : <https://doi.org/10.47435/retorika.v3i1.577>

sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Perdagangan sebagaimana dilansir di portal <https://www.ekon.go.id/> “Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang juga hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa dalam upaya stabilisasi harga minyak goreng, Pemerintah juga tengah mengadakan kegiatan operasi pasar. “Pada saat ini kita juga sebenarnya masih mengadakan operasi pasar untuk 11 juta liter di 47 ribu gerai pasar modern. Hari ini sudah terealisasi sebanyak 4 juta liter, jadi 7 juta liter on-going dilaksanakan,” ucap Menteri Lutfi”

Sebenarnya, upaya pemerintah terlihat berupaya melakukan upaya dalam mengatasi kelangkaan dan terutama mahalannya harga minyak goreng di pasaran. Ini terlihat dari banyak peraturan menteri dagang, sebagaimana direkam oleh katadata.com bahwa hingga per Februari 2022 terdapat 6 peraturan menteri yang mengatur mengenai minyak goreng seperti; Peraturan Menteri Perdagangan No 01/2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Sederhana untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPPKS. Aturan ini menekankan upaya dalam pemenuhan stok kebutuhan dalam negeri atauran ini diperkuat dengan Permendag No 02/2022 tentang Perubahan Permendag 19/2021 tentang Kebijakan Pengaturan Ekspor. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPPKS. Hingga Keputusan Menteri Perdagangan No 129/2022 tentang Penetapan Jumlah Untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri (*Domestic Market Obligation*) dan Harga Penjualan di Dalam Negeri (*Domestic Price Obligation*). Keluar pada 10 Februari 2022 aturan ini berlaku 15 Februari 2022. Eksportir CPO dan turunannya wajib mengalokasikan kebutuhan dalam negeri (*domestic market obligation*) sebesar 20% untuk Crude Palm Oil dan/atau Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein dari volume ekspor.

Keberadaan peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri perdagangan dalam tata kelola minyak goreng tidak berimplikasi secara positif dalam mengatasi krisis minyak goreng tersebut. bahkan di berbagai tempat masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh minyak goreng baik yang kemasan maupun curah. Bahkan banyak penjual yang masih menjual minyak di atas dari harga yang HET yakni Rp. 14.000. Berbagai faktor menjadi penyebab kenapa minyak masih sulit dan mahal, salah satunya karena banyak pelaku bisnis yang lebih memprioritas untuk menjual ke luar negeri (diseludupkan) sehingga berdampak berkurangnya stok minyak goreng dalam negeri.



Gambar 2. Inspeksi Presiden RI pada salah satu minimarket

Dalam postingannya di Twitter Joko Widodo selaku presiden RI, merespons terkait masih langka dan tingginya harga minyak goreng meski peraturan dan instruksi ke bawahannya. Pada tweetnya Presiden mengemukakan untuk melakukan upaya secara serius dan cepat dalam menangani krisis minyak goreng. Tweetnya juga disertai dengan foto yang menunjukkan inspeksi langsung ke lapangan untuk melihat kondisi stok minyak goreng di salah satu mini market. Gambar ini merupakan bentuk komunikasi simbolis yang dilakukan Joko Widodo selaku Kepala pemerintahan, meski sebenarnya hal ini bisa diwakili oleh menterinya, namun dengan turun langsung kelapangan merupakan komunikasi simbolis yang menunjukkan keseriusan, kepekaan dan tanggung jawab seorang pemimpin terkait krisis minyak goreng yang dialami masyarakat Indonesia.

Tidak efektifnya PERMEN No. 06/2022 dalam mengatasi tingginya dan kelangkaan minyak goreng karena rendahnya harga yang ditetapkan oleh pemerintah, yang tidak sebanding dengan biaya produksinya serta tingginya harga pasaran minyak goreng di luar negeri sehingga terjadi banyak penyelundupan. Maka dalam merespons Menteri perdagangan mengeluarkan peraturan baru yang mengatur mengenai HET yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 sekaligus mencabut Peraturan Menteri No. 06 tahun 2022. Perubahan aturan ini kemudian mencabut harga HET minyak kemasan atau harga minyak kemasan ditentukan oleh mekanisme pasar, sedangkan aturan HET hanya diberlakukan untuk minyak goreng curah yang merupakan minyak konsumsi masyarakat atau UMKM menengah ke bawah. Upaya lain dilakukan pemerintahan pusat adalah dengan melakukan keputusan presiden Joko Widodo yang kemudian ditindak lanjuti oleh menteri

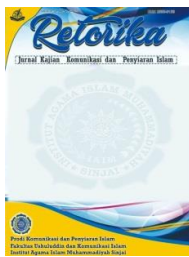
perdagangan M. Lutfi dalam bentuk peraturan Menteri perdagangan Nomor 22 tahun 2022 mengenai larangan sementara ekspor minyak CPO yang berlaku per 28 April. Keputusan Presiden disosialiskan melalui konferensi pers yang juga ditweet di akun presiden Joko Widodo sendiri.

Dengan pencabutan harga HET untuk minyak kemasan, berdampak ketersediaannya kembali stok minyak goreng di pasar hingga mini market. Serta turunnya harga minyak yang semula RP. 24.500/liter menjadi RP. 20.000. Namun krisis belum terselesaikan meski stok minyak goreng kemasan sudah tersedia namun minyak goreng curah (yang ditetapkan HET sebesar 14.000/liter atau 15.500/kg) masih sulit ditemukan oleh para pedagang mikro kecil. Di samping itu banyak aspek yang rugi akibat kebijakan pelarangan ekspor ini seperti turunnya devisa Negara, pengurangan produksi sawit yang berakibat pada petani sawit dan sebagainya. Akibatnya keputusan ini kemudian dicabut oleh pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh presiden Joko Widodo di akun Twitternya.



Gambar 3. Pernyataan Presiden RI Mengenai Pencabutan Aturan Larangan Ekspor Minyak Goreng (CPO)

Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Pusat dalam mengatasi krisis minyak goreng. Meski kelangkaan minyak goreng terutama kemasan sudah diatasi, namun permasalahan yang terjadi adalah masih ada, terutama masih tingginya harga minyak goreng curah yakni di atas harga HET (harga eceran tertinggi) nya Rp. 14.000, misalnya per 2 Juni 2022 harga diberbagai pasar di Palembang masih berkisar Rp. 18.000 (<https://palembang.tribunnews.com>). Padahal Presiden Jokowi telah



menjanjikan untuk melakukan penurunan harga minyak hingga memenuhi HET atau harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.

2) Penegakan Aturan

Krisis minyak goreng baik berupa kelangkaan maupun naiknya atau tingginya harga minyak goreng yang masih terjadi, meski beberapa upaya pemerintah telah dilakukan baik dengan menerbitkan berbagai aturan maupun upaya instruksi/komunikasi krisis persuasif ke berbagai institusi pemerintahan daerah dan kementerian untuk melakukan operasi pasar. Persoalan ini dikarenakan masih banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum dalam melakukan praktik curang seperti penimbunan, penyelundupan dan korupsi minyak goreng. Berbagai upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengungkap kasus tersebut salah satunya adalah pengungkapan kasus penimbunan minyak goreng 53 Ton yang melibatkan distributor sembako di kota Palu (<https://nasional.tempo.co/read/1574114/kasus-penimbunan-53-ton-minyak-goreng>). Hingga per 21 April kepolisian RI sebagaimana pada laman berita portal www. Liputan 6.com bahwa sudah 18 kasus penyelewengan minyak goreng yang ditanganinya.

Kasus penyelewengan minyak goreng yang terungkap dan menjadi berita besar adalah kasus penangkapan Che Wei yang terlibat kasus korupsi minyak goreng. Sebagaimana di ulas pada majalah tempo Sabtu 21 Mei 2022, bahwa Lin Che Wie merupakan tersangka kelima korupsi minyak goreng, dimana sebelumnya penyidik menjerat Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Komisaris PT wilmar serta 3 tersangka lainnya. Upaya penegakan hukum dalam krisis minyak goreng ini merupakan suatu upaya dalam mengatasi atau meminimalisir dari berbagai pihak baik dari pedagang nakal, pengusaha hingga pejabat pemerintahan sendiri yang memiliki kepentingan jahat dalam memanfaatkan situasi krisis ini. Bahkan Jokowi berharap terjadinya pengusutan secara tuntas kasus mafia minyak goreng tersebut.

3) Bantuan Pemerintah bagi masyarakat

Mekanisme pasar dalam penentuan harga minyak goreng, membuat pemerintah kurang memiliki otoritas yang penuh untuk memaksakan harga, namun demikian pemerintah sebagaimana dikemukakan hukum Keynesian, bahwa negara bisa melakukan intervensi berupa kebijakan baik secara moneter dan Fiskal. Oleh karenanya fluktuasi harga dan kurang efektifnya peraturan peraturan terkait minyak goreng, serta untuk menjaga daya beli masyarakat, maka pemerintah melakukan kebijakan subsidi baik subsidi untuk minyak goreng curah yang kemudian dituangkan dalam Peraturan menteri perdagangan Nomor 30 Tahun 2022 serta subsidi berupa

Bantuan Tunai Langsung (BLT) minyak goreng. Sebagaimana dilansir di Kompas.Com. BLT minyak goreng ini untuk periode 3 bulan yakni April, Mei dan Juni yang besarnya senilai Rp. 300.000. keputusan presiden tersebut juga dilansir pada akun twitter presiden RI Joko Widodo.

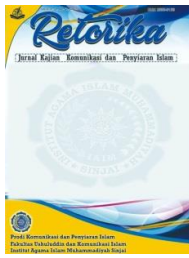


Gambar 3. Presiden Menyampaikan BTL Untuk Minyak Goreng

Dalam tweetnya, Presiden Joko Widodo mengambil keputusan terkait masyarakat yang rawan terkena krisis minyak goreng tersebut yakni dengan memberi bantuan atau yang dikenal dengan BLT minyak goreng. Bantuan ini diperuntukkan untuk 20.5 juta keluarga yang terdaftar sebagai penerima bantuan serta 2.5 juta PKL. Kebijakan ini diharapkan bisa membantu atau meringankan terkait dengan krisis minyak goreng yang terjadi serta secara ekonomi, bantuan ini dapat menjaga daya beli masyarakat yang tersungkur akibat Pandemi Covid-19.

4) Kebijakan Pergantian Menteri atau *Resuffel*

Berbagai program dan keputusan atau peraturan yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi krisis minyak goreng, namun belum menghasilkan yang memuaskan. Bahkan harga minyak goreng curah masih di atas dari harga tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah yakni Rp. 14.000. persoalan ini semakin bertambah dengan keterlibatan pejabat di kementerian perdagangan pada kasus korupsi minyak goreng. Persoalan ini boleh jadi merupakan ketidakmampuan Menteri perdagangan M. Lutfi dalam menerjemahkan instruksi Presiden dan menyelesaikan permasalahan minyak goreng. Presiden kemudian menggunakan hak prerogatifnya untuk melakukan resuffel jajaran menteri. Kebijakan resuffel ini diumumkan presiden pada tanggal 15 Juni 2022 di mana Presiden Jokowi mengganti posisi menteri perdagangan yang semula dijabat oleh M Lutfi di ganti dengan Zulkifli Hasan yang merupakan ketua PAN. Menteri agraria dan tata ruang yang diisi oleh Sofyan Djalil diganti oleh Hadi Tjahjanto yang pernah menjadi Panglima TNI. Meski

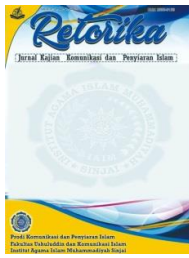


perombakan menteri terutama menteri perdagangan, oleh beberapa pengamat kental dengan nuansa politisnya. Namun, secara umum pergantian ini menunjukkan kekecewaan Presiden Jokowi terhadap kinerja M. Lutfi dalam menangani sengkaret atau krisis minyak goreng. Pengangkatan Zulkifli Hasan sebagai Menteri perdagangan diharapkan akan mampu mengeluarkan Indonesia dari krisis minyak goreng ini sebagaimana dikemukakan oleh Zulkifli hasan sendiri pasca dilantik sebagaimana dilansir oleh berita portal [www. Cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com). *Hari hari ini kan soal minyak goreng yang belum tuntas, kasihan rakyat kalau ini tidak dilaksanakan dengan cepat,” Saya kira background pengalaman saya yang panjang bisa banyak membantu segera menyelesaikan masalah ketersediaan minyak goreng di manapun dengan harga terjangkau. Itu yang paling penting.*

4. Kesimpulan

Sebagaimana dikemukakan pada kajian teori bahwa terkait dengan strategi komunikasi krisis, Menurut Liu & Levenshus (2012) dan Coombs (1995; 2010), terdapat empat kategori besar dalam merespons krisis, yaitu menyangkal (*deny*), mengurangi (*diminish*), membangun kembali (*rebuild*), dan memperkuat (*reinforce*). Strategi penyangkalan (*deny*) lebih baik digunakan untuk mengatasi rumor atau isu. Krisis yang disebabkan oleh kecelakaan atau riwayat masa lalu biasanya ditangani menggunakan strategi pengurangan (*diminish*). Strategi untuk membangun kembali (*rebuild*) biasanya digunakan untuk mengantisipasi krisis dan strategi *reinforce* meliputi pemberian kompensasi, permintaan maaf, tindakan korektif, dan pemberian keuntungan.

Dalam upaya penanganan krisis minyak goreng baik berupa kelangkaan maupun naiknya harga minyak goreng berdasarkan strategi komunikasi krisis di atas, maka bisa disimpulkan pemerintah Indonesia telah berupaya melakukan atau menerapkan semua cara. Penyangkalan yang dilakukan tidak semata untuk melepas tanggung jawab pemerintah terhadap situasi krisis, namun cenderung menjelaskan duduk persoalan secara objektif dan penyebab permasalahan meski upaya-upaya pemerintah telah ditempuh. Persoalan yang mengemuka mengenai krisis tersebut seperti bahwa penentuan harga minyak goreng diatur melalui mekanisme pasar, upaya pemerintah untuk menentukan harga lokal bisa dilakukan dengan melakukan peraturan berupa penetapan harga tertinggi eceran atau HET. Penetapan harga ini serta merta tidak berlaku di pasaran luar negeri, sehingga mengakibatkan banyak pedagang nakal atau pengusaha yang tetap menjual dengan harga pasaran dunia atau melakukan penyelundupan untuk dijual di luar negeri. Oleh karenanya upaya

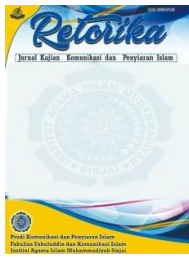


pengecangan dan pelaksanaan peraturan ini mesti melibatkan kepolisian, terutama upaya menangkap pelaku atau oknum yang memanfaatkan situasi ini seperti penimbun dan penyelundup minyak goreng. Upaya penegakan hukum ini memuncak pada pengungkapan kasus korupsi izin ekspor minyak goreng oleh pengusaha yang melibatkan pejabat di kementerian. Keterlibatan aparat pemerintah jelas berefek pada kredibilitas pemerintah dimata masyarakat yang mungkin bisa berefek fatal ke depannya misalnya hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berbagai peraturan dibuat untuk menekan krisis kenaikan harga minyak goreng serta mengatasi kelangkaan minyak goreng di pasaran Indonesia seperti pengaturan dan pelarangan ekspor minyak sawit. Hal ini merupakan bentuk atau strategi mengurangi atau membangun kembali dari krisis minyak goreng tersebut. Adapun strategi komunikasi krisis yang berupa reinforce, bentuk implementasinya yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan kebijakan bantuan dan subsidi. Bantuan subsidi diarahkan berupa subsidi harga minyak curah yang merupakan bahan konsumsi pokok dari pelaku usaha mikro dan kecil dan bantuan langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar Rp 300.000 diharapkan sebagai kompensasi pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga minyak goreng serta untuk menjaga daya beli masyarakat. Upaya lain yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan atau krisis minyak goreng ini yakni melakukan pergantian Menteri yang berwenang dalam mengatasi permasalahan ini yakni dengan mengganti Menteri perdagangan M. Lutfi dengan Zulkifli Hasan, pergantian ini merupakan bentuk upaya pemerintahan Joko Widodo untuk mengatasi permasalahan minyak goreng.

Daftar Pustaka

- Coombs, W. T. (2010). Parameters for crisis communication. *The Handbook of Crisis Communication*, 17±53.
- Coombs, W. T. (2014). *Ongoing crisis communication: Planning, managing, and responding*. Sage Publications.
- Fearn-Banks, Kathleen. 2009. *Crisis Communication: A Casebook Approach*. Lawrence Erlbaum Associates. London
- Mohammad Bahtiar & Bungin, Burhan. 2020. *Coorporate komunikasi (Komunikasi Perusahaan)*. PRENADA Media Group. Jakarta
- Rachmat. 2018. *Dasar-dasar Manajemen Pemerintahan*. CV Pustaka Setia. Bandung
- Sedarmayanti, Prof. Dr. Hj. *Komunikasi Pemerintahan*. PT. Refika Aditama. Bandung
- Sellnow, Timothy L & Seeger, Matthew W. 2013. *Theorizing Crisis Communication*. John Wiley & sons, Inc. United Kingdom
- Coombs, W. T., & Holladay, S. J. (2009). *Further explorations of post-crisis communication: Effects of media and response strategies on perceptions and intentions*. *Public Relations Review*, 35(1), DOI: 10.1016/j.pubrev.2008.09.011



RETORIKA

Jurnal Kajian Komunikasi dan Penyiaran Islam

Volume 4, No. 2, 2022

P-ISSN : 2655-5166 / E-ISSN : 2715-2103

Email : jurnalretorika46@gmail.com

Homepage : <http://journal.iaimsinjai.ac.id/indeks.php/retorika>

DOI : <https://doi.org/10.47435/retorika.v3i1.577>

TEMPO. Edisi 14 (23-29 Mei 2022)

<https://industri.kontan.co.id/news/minyak-goreng-masih-langka-ini-lo-6-aturan-mendag-di-2-bulan-pertama-2022> diakses pada tanggal 15 Juni 2022

<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3580/kebijakan-menyediakan-minyak-goreng-harga-terjangkau-wujud-nyata-pemerintah-menjamin-pemenuhan-kebutuhan-rakyat>. diakses pada tanggal 15 Juni 2022

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220615142241-92-809308/zulkifli-hasan-percaya-diri-bisa-atasi-masalah-minyak-goreng>. diakses pada tanggal 15 Juni 2022

<https://nasional.tempo.co/read/1574114/kasus-penimbunan-53-ton-minyak-goreng>). diakses pada tanggal 15 Juni 2022